

Dramaturgi Pesta Demokrasi Pilkada Langsung Serentak

Ilham Prisgunanto*

Abstrak

Pilkada serentak adalah sebuah prestasi besar dalam sejarah politik lokal di Indonesia. Pelaksanaannya yang nyaris tanpa letupan dan gesekan besar sosial ditunjukkan dengan bagaimana masyarakat berkehidupan memilih dan bijak dalam menentukan pilihan politik mereka. Tulisan ini adalah sebuah renungan atas pelaksanaan Pilkada dan kemungkinan gesekan yang akan ada di masyarakat dalam Pilkada langsung serentak yang akan datang.

Dari tulisan yang ada berangkat dari kajian perspektif komunikasi dengan menggunakan satu teori besar, yakni; konsepsi Dramaturgis dari Erving Goffman dan Kenneth Burke juga ranah publik. Konsepsi teoritik ini menunjukkan, bahwa berpolitik haruslah seimbang, netral dan bisa memuaskan semua pihak. Di sini akan dilihat bagaimana anggapan para pemilih (voter) dalam melihat Pilkada langsung dan serentak.

Dari tulisan ini ingin menunjukkan, bahwa Pilkada serentak kerap dilihat sebagai ajang keriaan politik layaknya pernikahan. Ketidaksiapan pelaksanaan sangat kentara dengan banyak pemilih (voter) sehingga menjadi Golput (Goloongan Putih). Kekecewaan dari sentimen pribadi tersebut merupakan 'percikan' awal yang dalam pelaksanaan Pilkada langsung selanjutnya. Kekecewaan itu akan menjadi potensi gesekan di masyarakat dan bisa menjadi sebuah konflik besar atas kekecewaan yang lebih besar lagi yakni Negara dalam konteks pesta demokrasi nasional.

Kata kunci: *Pilkada, Dramaturgi, Ranah Publik, Aparat, Keriaan, voter*

Pendahuluan

Indonesia sudah melaksanakan keriaan besar dalam kehidupan demokratisasi politik lokalnya melalui Pilkada serentak yang diadakan pada 9 Desember 2015 kemarin. Pelaksanaannya dinilai banyak pihak berhasil dan sukses tanpa ada cacat sedikit pula dalam pelaksanaannya di lapangan. Meski ada beberapa gesekan-gesekan

kecil antar kelompok dan kericuhan-kericuhan sementara yang bisa diselesaikan secara internal sehingga menandakan sudah ada kedewasaan berpikir politik lokal orang Indonesia. Tentu saja ini adalah hal yang sangat wajar dalam pelaksanaan pesta demokrasi tingkat lokal pada masyarakat yang sudah melek politik.

Begitu banyak perdebatan panjang tentang pelaksanaan Pilkada serentak karena disinyalir akan menimbulkan ekses negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Berawal dari pelaksanaan Pilkada langsung yang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Isu yang menyertai Pilkada langsung

* Ilham Prisgunanto adalah Lulusan Doktor Ilmu Komunikasi, dosen tetap STIK-PTIK, dosen luar biasa Universitas Indonesia dan penulis buku.

adalah akan banyak praktik politik uang yang semia itu akan berakhir pada perkara hukum bagi kepala daerah dan itu akan mengendurkan semangat anti korupsi pada bangsa Indonesia (Kompas, 25/9/2015). Wacana pemilihan kepala daerah melalui parlemen mencuat dan ini menjadi perdebatan dan menimbulkan reaksi keras dari beberapa fraksi dalam partai politik.

Rangkaian pelaksanaan Pilkada langsung dan serentak pada tahap pertama yakni tahun 2015 dan dilanjutkan 2018. Pada 2015, dilaksanakan pilkada serentak tahap pertama bagi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota yang masa jabatannya sudah berakhir pada tahun tersebut. Sedangkan Pilkada serentak tahap kedua berlangsung 2018 untuk gubernur, Bupati dan Wali Kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2016, 2017, dan 2018. Maksud terbesar penerapan pilkada serentak ini adalah dalam rangka penghematan biaya Negara.

Isu terbesar dalam pelaksanaan Pilkada langsung dan serentak adalah menyoal keamanan menjelang, pelaksanaan dan usai pelaksanaan Pilkada langsung serentak itu sendiri. Keberhasilan ini adalah sebuah prestasi besar bagi aparat keamanan dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Inti dari keamanan dan pengamanan adalah koordinasi yang kuat antara semua instansi yang berkepentingan dalam urusan keamanan dan pengamanan ini (Kompas, 2015). Tentu saja di sini, instansi samping dimaksud adalah, jajaran; Polri, KPK, TNI, dan Pemerintah Daerah.

Memang satu hal yang sangat dikhawatirkan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak adalah potensi politisasi isu agama atau etnis (SARA) dalam pelaksanaannya. Ketakutan ini wajar sehubungan dengan bercermin dari pelaksanaan Pemilu Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif yang dianggap cukup ramai dan kisruh sehingga ada sikap traumatis pelaksanaan Pilkada serentak ada.

Isu menarik yang tidak kalah penting adalah menyoal dipolitisasi isu agama dan SARA yang ada di masyarakat. Diakui saat ini pelakunya hanya segelintir orang dan mulai masuk dalam konteks kelompok dengan upaya menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan di antara sesama pemilih di lapangan. Kekhawatiran itu pernah dikemukakan Ketua Umum PBNU yang terpilih kembali, Said Aqil Siroj, yang mengimbau agar calon kepala daerah maupun pemuka agama di mana pun untuk tidak menggunakan isu agama dalam merebut dukungan politik (Medina Onlie, 19/9/2015).

Kajian Teoritik Dramaturgi (*Dramaturgy*)

William Shakesphere dengan mottonya yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *Totus Mundus Agit Histriionem (All the World is Theater)* menunjukkan betapa teater itu sering diartikan sebagai tempat melakukan pertunjukkan di atas sebuah panggung yang kini tidak lagi memerlukan panggung secara fisik, seperti; gedung-gedung pertunjukkan. Untuk itu, pembahasan tulisan ini dianggap tidak terlalu membutuhkan sebuah panggung yang bersifat fisik. Metafora-metafora yang digunakan dalam teater selalu kaya dengan arti simbolik konteks sosial budaya.

Teori dramaturgi dianggap menarik karena secara garis besar berkaitan dengan studi perilaku interaksi dan tatap muka. Dramaturgi menjadi bagian dari ilmu sosial yang dilakukan dengan mengatur sikap, perilaku, dan perasaan masyarakat modern. Dramaturgi juga merupakan instrumen sangat kuat dan berharga sebagai tambahan ke sebuah konstruksi realitas sosial yang dijiwai oleh semangat dan kebijaksanaan (Young, 1990: 74).

Burke menganggap kebiasaan tindakan keseharian manusia yang dijalankan ibarat dalam panggung sandiwara. Interaksi simbolik yang dilakukan dalam tindakan keseharian seperti

drama disebut oleh Burke sebagai dramatisme atau dramatism. Menurut Burke, salah satu hal yang terpenting dan menjadi konsep dasar dalam dramatisme ialah aksi (*act*).

Oleh karena itu, dramatisme disini ialah menyangkut studi tentang aksi atau tindakan. Setiap makhluk ciptaan Tuhan memiliki *motion* atau gerak. Ada perbedaan antara makhluk ciptaan Tuhan dengan diri Manusia. Manusia memiliki kemampuan gerak (*motion*) akan tetapi juga memiliki aksi dan tindakan (*act*). Burke mengatakan, bahwa *action* merupakan tingkah laku dari individu dan bersifat sukarela (Djuarsa, 2005: 1.40).

Dramatisme yang dikemukakan oleh Burke menyangkut model-model yang dapat diteliti diantaranya:

1. Tindakan atau *act* yang dilakukan oleh aktor. Berupa penampilan kata-kata drama untuk mendemonstrasikan komitmen menjadi sebuah ealita.
2. Situasi atau *scene* maupun setting dari tindakan. Konteks tentang dimana dan kapan sebuah aksi ditampilkan (setting/latar).
3. Aktor/pelaku atau agent dan semua karakter yang dimiliki oleh si aktor. Pesan yang disampaikan oleh aktor berupaya referensi kepada diri (*self*), pikiran (*mind*), dan tanggung jawab seseorang (*personal responsibilities*). Fokusnya karakter dan si aktor harus bersikap konsisten.
4. Alat dan prasarana atau agency merupakan yang digunakan oleh si aktor untuk menjalankan tindakannya. Alat maupun prasarana tersebut berguna untuk membuat pekerjaan selesai.
5. Maksud dan tujuan atau *purpose* ialah dari tindakan si aktor tersebut. Tujuan dalam pesan yang menunjukkan, bahwa pesan sebagai keinginan yang besar dari pembicara

untuk mengikat atau memberikan hasil yang terbaik dalam hidup yang disebut *mysticism* atau kepercayaan untuk meraih dan melengkapi kebenaran dan pengetahuan.

Perlu dipahami bahwa kelima elemen tersebut dianggap sebagai konsep 4W+1H, *what, who, when, why, and how of all actions*. Elemen tersebut mengajarkan aktivitas yang kreatif bahwa sesungguhnya secara alamiah aktivitas seseorang pada dasarnya adalah panggung teater. Menurut Erving Goffman (1922-1982), ia menganggap bahwa dramaturgi merupakan penciptaan (*creation*), perawatan (*maintenance*), perusakan (*destruction*) dari pengertian-pengertian yang sama mengenai realitas oleh orang yang bekerja secara individu dan kelompok untuk menyajikan dan menyatukan gambaran realitas.

Hal tersebut tersaji dalam bagaimana seorang aktor dalam perannya (*role*) ingin menyampaikan pesan lewat peran yang dilakoni. Erving goffman menyatakan bahwa dalam melakoni suatu peran, seseorang menggunakan topeng (*mask*) untuk membentuk dirinya sesuai dengan peran yang dijalankan. Hal ini karena topeng yang dipakai adalah diri kita sesungguhnya yang ingin diraih. Bagi Goffman, bahwa diri yang ingin diraih termotivasi oleh keinginan untuk dianggap baik dihadapan orang lain maupun dirinya sendiri dan setiap interaksi yang dilakukan oleh si aktor dengan menawarkan kesempatan untuk memunculkan anggapan itu (Goffman, 2005: vii). Akhir dari pemakaian topeng itu, ialah peran seseorang menjadi bentuk alami kedua dan sebuah bagian turunan dari personalitas seseorang. Seseorang yang datang ke dunia untuk menjadi individu yang mampu mencapai karakter yang ingin diraih, dan menjadi seseorang yang diinginkan (Goffman, 1972: 30).

Jika dikaitkan dengan dramaturgi menurut Goffman, maka elemen-elemen yang akan diteliti diantaranya terdiri dari enam, yaitu:

1. *Performances* Pertunjukan yang dilakukan oleh seseorang yang secara sengaja untuk memperoleh respon tertentu dengan memperhitungkan tingkah laku tertentu. Sedangkan sisanya akan berjalan secara alami. Akan tetapi, tujuan akhir untuk meyakinkan orang lain agar dianggap sesuai seperti yang diinginkan. Komponen dari pertunjukkan meliputi:
 - a. *The Front*
Bagian depan adalah peralatan, termasuk didalamnya peralatan fisik dari settingan sosial seperti peralatan personal ekspresi sebagai pakaian, jenis kelamin, atau umur yang berfungsi untuk menjelaskan pertunjukkan kepada peneliti.
 - b. *Dramatic Realisation*
Dramatic realisation adalah realisasi sebuah drama dimana seseorang berusaha untuk mengubah aktivitasnya selama berinteraksi dengan berbagai tanda (signs) untuk menyampaikan fakta bahwa yang lain menjadi tidak mudah dibaca.
 - c. *Idealisation*
Idealisasi merupakan kecenderungan seorang aktor untuk menunjukkan kesan yang ideal kepada penontonnya.
 - d. *Expressive Control*
Aktor tersebut juga harus mengontrol ekspresinya untuk menjaga agar tidak jatuh kepada suasana hati yang tidak konsisten dan energi yang dapat menghentikan pertunjukan.
 - e. *Misinterpretation*
Orientasi terhadap situasi membutuhkan penerimaan dan pengertian dari tanda yang diberikan aktor kepada audience. Apabila audience tidak menerima atau bahkan tidak mengerti maka kesalahan interpretasi akan terjadi.
 - f. *Mystification*
Mystification menyangkut pengelolaan terhadap jarak sosial di mana audience tetap terkesima dengan penampilan si aktor. Penampilannya bisa membuat citra yang positif maupun negatif. Hal ini disebabkan karena citra yang sudah melekat dalam diri aktor tersebut.
2. *Tim (Teams)*
Pada dasarnya dalam kasus ini sebuah pertunjukkan biasanya dilakukan secara individu untuk menonjolkan karakternya. Akan tetapi, dalam sebuah pertunjukkan biasanya ada juga kerja sama dari sebuah tim atau kelompok untuk mengekspresikan karakteristik dari situasi sosial.
3. *Daerah (Regions)*
Pertunjukkan seringkali dibagi menjadi dua daerah sosial yakni "*front regions*" dan "*back regions*". *Front regions* adalah tempat berlangsungnya pertunjukkan. *Back regions* adalah tempat dimana fakta-fakta yang tidak boleh terlihat di dalam sebuah pertunjukkan terjadi.
4. *Discrepant roles*
Kemampuan seseorang menjalankan peran yang seharusnya berbeda. Disini kredibilitas dari aktor pertunjukkan dalam memerankan panggung depan dan panggung belakang tetap terjaga.
5. *Komunikasi di luar karakter (Communication out of character)*
Menyangkut ekspresi dari perasaan sentimen yang mana berbeda dari pertunjukkan. Seringkali komunikasi di luar karakter terjadi di panggung belakang sesama rekan satu tim. Sebagai contoh *treatment of the absent*, *staging talk*, dan *team collusion*.
6. *Pengelolaan kesan (Impression management)*
Agar tidak terjadi rasa malu yang berlebihan dalam melakukan interaksi sosial, semua

partisipasi dibutuhkan untuk memiliki beberapa atribut dan mempraktekannya. Hal ini dikategorisasikan oleh Goffman sebagai “*arts of impression management*” atau seni dari pengelolaan kesan dengan tiga bagian besar, yaitu:

a. *Defensive attributes and practices*

Di sini Goffman membagi bagian praktek *defensif* untuk mencegah rasa malu si aktor diantaranya dengan:

- 1) Kesetiaan dramaturgi (*dramaturgical loyalty*) Agar pemeran dapat mempertahankan perannya, selama pertunjukan, aktor tersebut harus mempraktekan *dramaturgical loyalty*.
- 2) Disiplin dramaturgi (*dramaturgical discipline*) Kegunaan aktor untuk berdisiplin di bagian ini ialah agar mencegah terbawa suasana lupa akan teknik untuk menjadi peran tertentu dalam panggungnya.
- 3) Peringatan dramaturgi (*dramaturgical cimeterspect*)

Hal ini berguna untuk anggota tim dalam menentukan pertunjukkan akan menjadi pertunjukkan yang bagaimana.

b. *Praktek Protektif (protective practices)*

Bagian ini adalah praktik defensif yang memiliki kesungguhan praktek protektif dari penonton. Penonton secara rela menolak untuk tahu area rahasia (*the secret area*) dari si aktor, tidak memberi tahu kesalahan atau menghina si aktor sehingga bisa membuat kontradiksi kepada si aktor. Selain itu penonton berpura-pura untuk tidak melihat kecacatan yang ada.

c. *Acuh Tak Acuh (tact regarding tact)*

Seorang aktor harus mempraktekkan sikap acuh tak acuh. Dengan kata lain,

si aktor harus bersikap acuh tak acuh terhadap respon yang diberikan oleh penonton dengan membaca petunjuk-petunjuk yang diberikan penonton dan memodifikasi pertunjukkan. Menurut Quinn di dalam jurnalnya, ia mengatakan bahwa:

“I shall consider the way in which the individual in ordinary work situations presents himself and his activity to others, the ways in which he and controls the impression they form of him, and the kinds of things he may and may not do while sustaining his performance before them.” (2005: 332).

Quinn beranggapan, bahwa kebiasaan individu di tempat kerja menampilkan diri orang tersebut dan aktivitasnya ke orang lain, bagaimana cara individu itu mengontrol *impression* yang dibentuk dari dirinya, dan bagaimana tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Permainan peran menjadi bagian yang penting dan pengembangan manusia dan itu semua dimulai sebelum seseorang memulai sesuatu yang baru dalam karirnya.

Berbeda dengan itu pandangan emik atau pandangan yang berhubungan dengan emosi atau empati, pemeran drama kehidupan disebutkan bahwa memiliki hasrat, harapan, dan kehidupan sendiri yang unik adalah modal dasar. Ia juga menambahkan bahwa pandangan tadi merupakan pandangan yang subyektif yang berguna untuk mengimbangi pandangan objektif. Hal ini pula yang turut menyumbang motif bahwa dalam peran yang ditunjukkan, setiap aktor menginginkan sebuah hasrat dan harapan yang ingin diraih.

Aktor juga memiliki kehidupan yang asli yang dimiliki oleh dirinya. Dramaturgi dalam hal ini merupakan suatu fenomena dimana seseorang berusaha menampilkan peran di panggung pertunjukkan (*the front stage*) untuk

menyampaikan suatu pesan dari peran yang dilakoni dan berusaha untuk mempertahankan karakter-karakter agar tujuan yang ingin dicapai dan menjadi sosok yang diinginkan. Semakin penonton mempercayai dan menerima bentuk aksi yang dilakukan oleh si aktor, semakin tinggilah tingkat keberhasilan si aktor. Selain itu, kehidupan asli (*the backstage*) menjadi karakter asli dari si aktor ketika turun dari panggung sandiwara.

Bahasan dan Diskusi

Dari tulisan ini akan diungkapkan tentang pelaksanaan Pilkada serentak dilihat dari cara pandang pemilih (voter) bila dikaji dalam konteks dramaturgis. Tulisan kajian ini akan memberikan masukan nyata tentang cara pandang atau perspektif pemilih (*voters*) dalam memandang pelaksanaan Pilkada langsung serentak dan sebaliknya akan memberikan masukan bagaimana seharusnya aparat keamanan bertindak dalam pengamanan Pilkada langsung serentak di lapangan di masa yang akan datang.

Dramaturgis Pemilih (*Voters*) Dalam Pelaksanaan Pilkada Langsung Serentak

Pilkada sudah usai, para pemilih sudah memberikan suaranya lewat bilik-bilik suara yang tersedia di TPS-TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di seantero nusantara. Semua bersukacita dan larut dalam kegembiraan yang bisa digambarkan oleh pers. Hal ini menandakan lancar berjalannya proses demokrasi di bumi pertiwi ini. Semua merasa lega dan puas dengan pelaksanaan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Daerah. Hanya ada kericuhan dan gesekan-gesekan kecil di wilayah tidak seperti yang banyak diprediksikan oleh pers akan bakal terjadi bentrokan besar dalam penyelenggaraan Pilkada serentak ini. Tentu pelaksanaan Pilkada damai merupakan nilai tambah dan prestasi besar bagi Pemerintahan. Hal ini menunjukkan

sedemikian serius Negara dalam upaya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat yang sesungguhnya.

Di satu sisi memang, Pilkada dapat diibaratkan sebagai sebuah drama besar dengan kumpulan episode yang kompleks, seperti pendapat Erving Goffman dan Kenneth Burke yang memberikan pandangan nyata, bahwa dunia ini seperti panggung sandiwara, dimana setiap orang memiliki lakon dan alur cerita yang jelas (Goffman and Burke dalam Samovar, 2004). Pilkada adalah sebuah drama pesta dan keriaan besar, dimana semua orang bertemu kepentingan dalam pelaksanaannya. Namun perlu ditekankan, bahwa Pilkada adalah sebuah pesta yang perlu dinikmati seluruh rakyat Indonesia dengan sukacita sebagai pertanda Negara yang utuh dan menjalankan praktik-praktik suara rakyat adalah suara Tuhan (*Vox Populi Vox Dei*). Memang sedemikianlah cita-cita yang diharapkan Negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.

Dalam pelaksanaan sebuah pesta atau keriaan besar, sudah dapat dipastikan memerlukan sokongan dana yang tidak sedikit. Semua itu dibebankan kepada Negara dengan upaya memuaskan keinginan rakyat dalam memilih calon (kandidat) Pemimpin Daerah mereka. Para pemilih (*voter*) adalah para tamu yang datang dan berhak untuk menikmati hidangan yang ada. Tentu saja yang menjadi tamu juga tidak sembarangan orang, harus para undangan yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Registrasi ini dimaksudkan agar ada kesesuaian jumlah pemilih dengan hitungan yang ada. Sayangnya menyoal DPT juga masih bermasalah dan banyak yang menjadi pengunjung gelap dalam keriaan ini. Mereka hanya bisa melihat pesta dan keriaan dari luar pagar TPS. Tentu saja mereka yang merasa teralienasi akan mudah tersulut amarah atas nama ketidakpuasan.

Pilkada adalah pesta pernikahan dan para tamu yang datang mengharapkan dapat beranjang sana dan tegur sapa dengan sang pengantin, yang tak lain adalah para kandidat Calon Bupati, Walikota dan Gubernur. Mereka dipasangkan dan dicocok-cocokkan guna mendapatkan sosok ideal yang serasi dan dapat memuaskan keinginan rakyat akan figur kepemimpinan lokal. Tentu saja para penganten yang dipasangkan ini tidak kurang-kurang mengeluarkan kocek, mulai dari konsumsi, riasan wajah sampai pagelaran seni yang akan diadakan pada saat pesta berlangsung.

Konsepsi ini sesuai dengan pandangan ranah publik yang disebutkan Jurgen Habermas tentang adanya ruang yang mempertemukan manusia tanpa harus terbalut oleh simbol-simbol yang dibawa. Ranah dimana orang bisa bebas berekspresi, bersuara dan tidak takut oleh kekuatan yang membelenggu. Ranah yang diharapkan hadir dalam sidang-sidang pembaca dalam kolom-kolom pers dan rentang waktu dalam penyiaran yang ternyata hanya sebuah utopia. Sebab diketahui bahwa media massa pasti memihak (Prisgunanto, 2004).

Para calon pemimpin daerah Pilkada harus mengeluarkan banyak kocek, seperti konsumsi yang dalam Pilkada diwujudkan dalam bentuk konsolidasi internal Partai Politik, dan isu-isu yang akan digulirkan dalam pelaksanaan Pilkada. Seperti halnya konsumsi, yang merupakan unsur yang termahal biayanya dalam pelaksanaan pesta. Demikianlah oleh sebab itu calon pemimpin daerah harus memikirkan penuh perhitungan matang untuk permasalahan ini.

Artinya jangan sampai konsumsi kekurangan dalam pesta karena akan menggagalkan dan menjadi bahan omongan (baca isu red*) negatif yang dapat membatalkan proses peminangan. Besarnya konsumsi tentu beragam sekali, untuk mereka yang mau meminang perempuan terkaya, terhormat dan berpengalaman tentu akan lebih

mahal daripada yang tidak. Demikian pula bila ingin meminang Partai Politik besar yang sudah punya nama tentu memerlukan dana yang lebih besar daripada Partai Politik yang dianggap kecil pendukung.

Dalam pesta seorang pengantin tentulah harus tampil cantik, indah dan menawan. Kesadaran untuk mempercantik dan berbenah diri saat ini masih dianggap kurang. Para calon pemimpin daerah jarang sekali merias dan menjaga citra diri yang mereka dimiliki. Dengan mereka mempercantik diri tentu akan membawa kesadaran rakyat akan tampilan yang ditunggu-tunggu. Biaya bersolek dan mempercantik diri memerlukan ongkos yang mahal, mulai dari membayar jasa perias, membeli perlengkapan rias (*make up*) dan menyewa busana juga aksesoris pendukung pada saat pesta.

Bersolek dalam pilkada nyata terlihat dalam bentuk memasarkan diri mereka terutama lewat pemasangan iklan, kampanye dan program-program sosialisasi. Pakaian calon pemimpin daerah harusnya menyilaukan, seperti; program-program bentuk langsung, hadiah-hadiah dan pembuatan fasilitas terbaru kepada rakyat, seperti; membangun tempat-tempat ibadah sampai dengan sekedar pembuatan pangkalan ojeg.

Tidak adanya kesadaran akan ini membuat tampilan mereka kurang cantik, menarik dan menawan. Tampilan mereka tak ubah bedanya dengan pengantin tanpa riasan (*make up*) dan dandanan di wajah yang memikat hati. Terkadang rambut calon pemimpin daerah berantakan dengan badan yang maaf masih berbau sawah, mata cekung yang letih, sehingga begitu kurang menarik. Semua ini berangkat dari satu hal mereka masih melupakan unsur utama dalam berjalannya mesin politik yaitu berkomunikasi politik dalam menjaga dan memelihara citra diri.

Apa yang diharapkan seorang pengantin dalam pesta pernikahan? Tentu saja doa dan

tidak lupa hadiah-hadiah buah tangan, paling sedikit uang titipan untuk mendukung mereka dalam upaya menempuh hidup baru. Tapi perlu diingat di sini, karena Pilkada sama dengan pesta pernikahan massal, bukan perorangan saja. Jadi para tamu dalam hal ini pemilih (*voter*) berhak memberi salam, doa dan uang titipan kepada pasangan siapa saja yang mereka kehendaki. Bentuk nyatanya terlihat dari sumbangan kado dalam pemilu dalam bentuk surat suara. Sayangnya masih banyak tamu yang kecewa dengan tampilan calon pengantin yang kurang layak dan tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka akhirnya frustrasi dalam memilih.

Akibatnya tak heran, bila tamu datang tetapi tidak memberikan kadonya dan mereka hanya mau berwisata politik. Itulah mereka para Golput (Golongan putih) yang marak saat ini. Kebingungan mereka dan pilihan menjadi Golput (Golongan Putih) cukup beralasan mulai dari menjadi calon Pemimpin Daerah mereka tidak dikenal, dipahami dan diketahui programnya sampai segala hal. Penantian Para tamu akan pengantin yang diharapkan yang dianggap bisa membawa mereka keluar dari persoalan yang rumit di wilayahnya saat ini tidak kunjung datang. Alhasil para voter merasa tertipu dan menyesal usai memilih karena mereka hanya bisa menunggu dan berharap yang tidak kunjung ada jawaban. Rasa ini akan mempengaruhi tingkat kesadaran pendidikan politik pada diri mereka ke depan.

Usai Pilkada tentu saja yang dilakukan adalah perhitungan suara, hal ini serupa dengan penghitungan uang kado (*angpou*) usai pernikahan. Tentu saja, harapan logis penganten adalah untung besar atau minimal kembalinya ongkos biaya pesta. Namun, tak jarang ditemukan sebaliknya. Jumlah suara yang diharapkan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Para pengantin malah harus nombok dan stress karena hasil keriaan tidak sesuai dengan daya dan upaya yang dikeluarkan selama ini. Kerap yang terjadi, para

penganten alias calon pemimpin daerah menjadi stress berat, depresi sampai kena kejiwaan mereka. Tentu saja tidak terbayang jumlah hutang yang harus mereka bayarkan usai pesta demokrasi ini.

Pesta yang diadakan terburu-buru, undangan yang tercetak masih basah belum kering betul dan tersebar, sampai pada konsumsi yang kurang sesuai tamu adalah gambaran miring pesta demokrasi Pilkada serentak yang diadakan bangsa Indonesia saat ini. Pihak penyelenggara dianggap kurang becus dalam bertindak dan terlalu lama dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Alhasil kesakralan-kesakralan sebuah pesta demokrasi dilanggar sehingga penyelenggaraannya dipertanyakan?

Banyak acara pesta diadakan tidak sesuai aturan pakem yang ada. Semua dilanggar dan dihilangkan, atas nama pembaharuan dan efektivitas. Akhirnya keabsahan pesta demokrasi ini menjadi prematur. Tak heran akhir dari drama ini adalah pesta demokrasi harus diulang yang berarti pengembungan dana Negara dan dan ketidakbecusan Pemerintah. Bila demikian, maka akan terjadi mandeknya kehidupan politik dan demokratisasi di Indonesia.

Apakah ini yang ingin diharapkan dalam kemajuan berpolitik bangsa Indonesia yang banyak dibanggakan dan diharapkan semua pihak? Klaim-klaim sederhana penyelenggaraan pesta demokrasi memang tidak ada takaran idealnya. Terlalu mewah akan dihujat dengan isu pemborosan, sebaliknya terlalu sederhana akan diklaim terlalu banyak pengamatan dan mengarah pada klaim penyelewengan tindakan korupsi dan pemotongan anggaran.

"Biar anjing menggonggong kafilah tetap berlalu," tapi ungkapan tersebut tidak akan tepat bila tuntutan keseriusan penyelenggaraan Pilkada serentak tidak direspon secara arif dan bijaksana dalam mewujudkan pesta demokrasi lokal sesungguhnya. Bagaimana juga Pilkada